

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan utama akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integritas dan keterpaduan jaringan.

Dalam hal ini sarana transportasi yaitu angkutan umum, merupakan salah satu bentuk angkutan umum yang mempunyai fungsi sebagai sarana penggerak manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yang juga merupakan sarana transportasi alternatif di dalam kota, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana ini sangat diperlukan di wilayah perkotaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ, khususnya Pasal 158, bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung

bekerjasama dengan seluruh Perusahaan Otobus selanjutnya disingkat PO, telah memperkenalkan moda transportasi massal yang diharapkan mampu mengatasi masalah transportasi yaitu Bus Rapid Transit Trans Bandar Lampung (Hasil wawancara di Dishub Kota Bandar Lampung).

Terdapat empat hal yang dapat dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi sederhana kondisi angkutan umum, yaitu: keselamatan, keamanan, keterjangkauan, dan kenyamanan yang selanjutnya disebut dengan 4K. Aspek pertama dan utama adalah masalah keselamatan. Hal ini tidak bisa ditawar sebab siapapun tentunya tidak menginginkan musibah menimpa. Berbagai data kecelakaan (Jasa Raharja, Kepolisian, Dinas Perhubungan) yang selalu berbeda menunjukkan bahwa angka korban kecelakaan meninggal dunia dan luka cukup mencengangkan. Aspek kedua adalah keamanan. Keamanan merupakan salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para penumpang. Kenyataan ini konsisten dengan berbagai kajian bahwa faktor keamanan sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam menentukan jenis kendaraan yang dipilih. Ketiga adalah masalah keterjangkauan. Pemerintah telah berupaya maksimal untuk mengatur tarif sehingga aspek keterjangkauan ini tidak menyusahkan rakyat banyak. Pelayanan angkutan kelas ekonomi yang sering kali dianggap sebagai kewajiban pelayanan umum, telah dicoba untuk diatur sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki berbagai aksesibilitas dalam aktivitas kesehariannya (Abbas, 2004).

Aspek terakhir dari 4K adalah kenyamanan. Dalam suasana di mana pasokan (*supply*) jauh lebih kecil daripada permintaan (*demand*), maka aspek ini

tampaknya harus lebih ditoleransi oleh para penumpang angkutan umum, utamanya yang berpenghasilan rendah. Bagi mereka yang berpenghasilan rendah, aspek survival akan lebih mengemuka dalam melakukan perjalanan. Sedangkan bagi yang berpenghasilan menengah ke atas, perjalanan dengan kendaraan pribadi biasanya akan menyebabkan kemacetan dan berujung pada ketidaknyamanan. Seperti halnya di Kota Bandar Lampung, segala persoalan transportasi seperti: kemacetan, ketidakteraturan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin banyak, dari tingkat disiplin pemakai jalanpun masih belum memadai, dari fenomena ini masih sering terlihat.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sangat berperan dalam mewujudkan pelayanan angkutan kota/angkutan umum yang baik bagi kesejahteraan masyarakat atau bagi kepentingan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas perhubungan dalam penataan lalu-lintas di Kota Bandar Lampung yang difokuskan pada pelaksanaan BRT Trans Bandar Lampung di kota Bandar Lampung, selain itu untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal di Kota Bandar Lampung dengan diadakannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung.

Pemerintah berusaha mendukung adanya usaha mewujudkan transportasi *massal* yang memadai di wilayah perkotaan dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi tentang sistem angkutan umum massal di perkotaan (Implementasi Konsep *Bus Rapid Transit*). Menyangkut kebijakan BRT, bahwa kebijakan tersebut adalah satu bentuk angkutan yang berorientasi pelanggan dan mengombinasikan halte,

kendaraan, perencanaan, dan elemen-elemen sistem terpadu dan memiliki satu identitas unik.

Pada prinsipnya, penerapan BRT di Bandar Lampung bukan menambah sistem angkutan kota yang baru. Melainkan mengubah sistem pengelolaan angkutan kota. Ketentuan dalam penerapan BRT di kota Bandar Lampung mengakomodasi operator angkutan eksisting, yaitu menjadi operator BRT/operator angkutan pengumpan BRT, orientasi benefit/keuntungan pengusaha diganti dengan orientasi menjual pelayanan dan biaya operasi operator BRT dipenuhi oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT di bawah Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung (Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung, 2012).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal di Kota Bandar Lampung dengan diadakannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a.** Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal;
- b.** Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem angkutan umum massal di Kota Bandar Lampung dengan diadakannya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana pelaksanaan sistem angkutan umum massal dengan dengan beroperasinya *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan publik di Kota Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dalam merumuskan Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar

Lampung dalam hal ini beroperasinya *Bus Rapid Transit* Trans Bandar Lampung;

2. Diharapkan dapat membantu upaya penyelesaian kesempurnaan di bidang pelayanan angkutan publik di Kota Bandar Lampung;
3. Sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang berminat melakukan penelitian lanjutan bidang pelayanan angkutan publik di Kota Bandar Lampung.